

Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta

Oleh: Tengku Rika Valentina

ABSTRACT

This paper reviews the last condition of the voters maps to support the political party in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) with the goal to get the data in form of prediction map of the DIY community choosen on the 2009 election. Main data used in the analysis are the survey report from the Portrait of Political Party Institutional Management in Indonesia in 2007, which was then equipped with data analysis from the Journal of LSI in 2007. Main theoretical framework used here is empirical-minimalist approach to the construction of Robert A. Dahl theory`s and voting behavior theory that is affected by three approach such as sociological, psychological, and rational.

Kata Kunci: *Demokrasi, perilaku pemilih, partai politik*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis yang dikemukakan oleh Schumpetrian, pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga

negara¹. Demokrasi juga mengarisikan bahwa pemilu adalah kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *check and*

¹ Robert A. Dahl. 1971. *Polyarchy: participation and Opposition*. New Heaven: Yale Univer-sity Press, hal 2. dan Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1989. *Democracy in Asia*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, hal xvi atau Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1990. *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, hal 6-7.

balances terhadap partai yang berkuasa (*ruling party*).

Masyarakat Indonesia, kini, tengah terjangkit demam perayaan demokrasi elektoral. Ada kesan kuat bahwa demokrasi hanya terfokus pada pemilihan umum, sebuah perayaan akbar yang sarat dengan pesta, kompetisi, sensasi, mobilisasi, *money politics*, intrik dan seterusnya. Ketika, perhatian publik habis terkuras untuk, pemilihan umum, mulai dari banyaknya partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda, teknis pencoblosan yang begitu rumit, pencalegan yang kacau balau, sampai dengan teka-teki presiden yang bakal dipilih langsung. Ujung perhatian itu adalah siapa yang bakal tampil menjadi presiden (orang nomor satu) di Indonesia.

Dengan berbagai cara (*polling*, forum diskusi, analisis, spekulasi, dan lain-lain) publik menaruh perhatian secara serius terhadap calon-calon presiden yang kini tengah sibuk memoles wajahnya. Pada saat yang sama, perhatian sebagian publik juga tercurah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sebagai respons atas naskah revisi UU No. 22/1999 menjadi UU No 32/2004. Seakan-akan persoalan bangsa yang rumit ini bisa diselesaikan dalam tempo lima tahun oleh sosok pemimpin yang diwakili oleh salah satu partai politik yang ada, yang memperoleh mandat dan legitimasi dari rakyat melalui pemilu. Publik

selalu mencari sosok partai yang hebat, yang diharapkan mampu mengatasi (*mrantasi*) segala persoalan republik ini. Tetapi harapan yang melambung tinggi itu berubah dengan cepat menjadi kekecewaan dan kegelisahan yang luar biasa karena hadirnya pemimpin baru yang dicalonkan oleh salah satu partai politik ternyata tidak membuahkan perubahan secara signifikan (jika tidak bisa disebut instan). Apakah ini karena harapan publik yang berlebihan, atau apakah karena memang pemimpin yang tidak becus berbuat memenuhi harapan rakyat? Yang jelas pola pikir sentralistik dan personalistik dalam jangka panjang tidak menguntungkan bagi proses konsolidasi demokrasi.

Ketika kita mencoba berkaca pada hasil pemilu 2004, reformasi politik, ekonomi dan hukum telah merubah berbagai tatanan sosial, ekonomi dan politik. Di bidang politik misalnya telah terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dalam tataran struktur maupun kultur politik. Pada satu sisi reformasi politik memaksa lembaga-lembaga politik untuk bersikap dan berperilaku akomodatif terhadap berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat. Pada sisi lain reformasi politik ternyata juga mampu menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melakukan kontrol dan kritik terhadap pemerintah.

Hal ini bisa dilihat pada dari kondisi terakhir peta dukungan pemilih pada partai politik

berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan September 2007 dimana Publik Indonesia bersikap skeptis terhadap partai politik. Sebagian besar (58.3%) publik kurang atau tidak puas dengan kerja partai politik selama ini. Hanya 25.5% saja yang mengatakan sangat atau cukup puas. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh publik yang puas dan tidak puas. Mereka yang puas dengan kerja partai politik sebagian besar (32.6%) mengajukan argumentasi partai telah memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara mereka yang tidak puas mengajukan argumentasi sebaliknya. Partai selama ini tidak memperjuangkan kepentingan rakyat².

Kemudian sumber data tersebut diperkuat dengan alasan Publik menilai secara negatif sosok partai politik, dari hasil penelitian LSI tahun 2007 dimana sebagian besar (74.1%) misalnya menyatakan partai hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Publik sebagian besar (73.2%) juga menyatakan keputusan yang dibuat partai seringkali tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Kondisi ini kemudian dipertegas lagi kondisi masih buruknya citra partai politik di mata publik tidak bisa dilepaskan dari banyaknya pembe-

ritaan negatif mengenai partai politik di media massa. Berita-berita itu sedikit banyak bisa mempengaruhi penilaian publik, meski perlu penelitian lebih dalam untuk melihat kaitan antara pemberitaan itu dengan citra partai politik.

Tuntutan agar partai politik memegang fungsi kebijakan terasa mengada-ada kalau kita tidak mendudukan partai politik sebagai eksponen dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Munculnya kesan ini bisa dimaklumi mengingat selama ini makna demokrasi mengalami pendangkalan secara luas. Pendangkalan terjadi melalui pengaburan dimensi kerakyatan oleh berbagai soal teknis berdemokrasi Apakah ada hubungannya dengan kesalahan kita memaknai sebuah konsep demokrasi?. Sebenarnya dalam situasi yang serba multikultural, demokrasi cenderung melakukan pengabaian (eksklusi). Proses debat dan perumusan kebijakan cenderung berlangsung dengan peminggiran terhadap individu atau kelompok tertentu. Debat dan perumusan kebijakan selalu ditandai dengan bias dan stereotip perumusannya terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diberi label negatif oleh masyarakat. Karena disebabkan oleh konsepsi universalitas individu dalam demokrasi, dalam pemahaman ini warga negara selalu dianggap memiliki kesamaan yang umum (*have in common similarity*) sehingga

² Lingkaran survei Indonesia Kajian Bulanan edisi Edisi 06 - Oktober 2007.

demokrasi selalu mengandaikan bahwa semua warga Negara harus diperlakukan secara sama (*equal treatment*).

Tidak lama lagi, bangsa Indonesia akan menggelar pemilihan umum (pemilu). Terhitung sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, 2004, pemilu 2009 mendatang adalah pemilu yang untuk ketiga kalinya digelar di tengah situasi transisi menuju demokrasi. Kenapa dikatakan masih di era transisi? Seperti diuraikan di atas, sampai sekarang masih belum terjadi konsolidasi demokrasi yang sejati, baik itu dikalangan masyarakat politik (partai politik, elit politik di tingkat nasional maupun lokal) dan ditingkatan *civil society* dalam merumuskan visi strategis agenda reformasi pasca tumbanganya rezim fasis Orde Baru.

Pertanyaan yang kemudian patut diajukan berdasarkan hasil prediksi dan perbandingan dari pemilu sebelumnya dan dari berbagai hasil survei: apakah telah terjadi pergeseran pilihan pemilih terhadap partai politik? Kalau terjadi, kemana para pemilih tersebut bergeser, apakah ke partai seideologi dengan partai lama atau kepada partai-partai baru yang tidak seideologi? bagaimana karakteristik dari masing-masing pemilih? Apa yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya? dan isu politik apa yang menjadi pertim-

bangkan pemilih dalam menentukan pilihannya? berdasarkan prediksi sementara apakah pemilu 2009 nantinya masih ada bayang-bayang oligarki dari partai politik?

Signifikansi dari tulisan singkat ini adalah mempunyai sebuah semangat untuk mengukur kompetensi dari partai-partai politik di tingkat lokal yang dilihat dari perpektif jawaban konstituen (kasus Yogyakarta)³. Dalam kerangka teori yang penulis buat nantinya penulis mencoba membuat bingkai analisa tentang peluang demokrasi di Yogyakarta dan memperediksikan peta perilaku memilih masyarakat pada pemilu 2009 nantinya dengan memakai tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan pendekatan rasional. Pendekatan yang penulis pakai disini adalah dilihat dari sudut pandang demokrasi minimalis (elektoral-prosedural), dengan mencoba membuat sebuah hipotesa awal dimana pemilu 2009 cukup memberi peluang bagi berakhirnya transisi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pendekatan ini, demokrasi hanyalah sekedar sebuah sistem dimana elit politik memperoleh kekuasaan untuk

³ Untuk melengkapi analisa peluang demokrasi dan peta perilaku memilih masyarakat Yogyakarta terhadap partai politik pada pemilu 2009. Selain memakai hasil laporan survei Potret Tata Kelola Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia penulis juga memakai analisa yang dibuat oleh LSI dan direktur lembaga kajian isu-isu strategis dan kawasan (lisan) Yogyakarta.

memerintah melalui satu pertarungan kompetitif guna mendapatkan suara rakyat. Meskipun dalam konsep demokrasi minimalis ini juga mengakui tingkat kebebasan tertentu (pers, organisasi, dsb.) agar kompetisi menjadi lebih bermakna. Tetapi dalam konsep minimalis semacam ini biasanya tidak begitu menaruh perhatian pada konsep-konsep kebebasan tersebut maupun menyertakannya dalam ukuran-ukuran aktual demokrasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka konseptual ini akan diarahkan pada *review* sejumlah perspektif (pendekatan) yang menjelaskan transisi dan perspektif alternatif yang berbeda tentang konsep demokrasi: dengan membongkar perspektif yang tidak memadai untuk menjelaskan proses transisi demokrasi di Indonesia serta menampilkan sebuah perspektif yang berbeda yang lebih memadai untuk menjelaskan perubahan transisi demokrasi. Pada bagian kedua penulis mencoba melihat tiga pendekatan dalam memahami perilaku memilih sehingga sehingga nantinya membantu penulis membuat prediksi dan membingkai serta memetakan sebuah karakteristik tentang perilaku memilih masyarakat Yogyakarta pada pemilu 2009 nantinya.

Peluang Demokrasi pada Pemilu 2009: Demokrasi Minimalis vs Demokrasi Maksimalis

Konsep demokrasi pada umumnya diterjemahkan secara mendasar sebagai pemerintahan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*). Tetapi definisi sederhana itu dalam perkembangannya mengalami kemerosotan makna (*pejoratif*). Setelah nazi dan fasisme mengalami kehancuran pasca perang dunia II, setiap rezim yang berkuasa – termasuk totaliter sekalipun di belahan dunia – selalu mengklaim dirinya demokratis dan bertindak atas nama rakyat. Klaim itu diwujudkan lewat munculnya banyak label demokrasi, seperti demokrasi kerakyatan, demokrasi ploretariat, demokrasi borjuis, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan sebagainya.

Untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratis atau non demokratis, para ilmuwan pada umumnya akan menjabarkan elemen-elemen kritis yang terkandung dalam frasa ”pemerintahan oleh rakyat”, selain dengan melihat perwujudan elemen-elemen demokrasi pada level empirik. Jika dikaji lebih dalam frasa ”pemerintahan oleh rakyat” itu menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis: ”siapa rakyat yang memerintah itu?” ”bagaimana rakyat memerintah?” seberapa besar rakyat terlibat memerintah? . Sejumlah pertanyaan ini menyebabkan demokrasi tidak

bermakna tunggal tetapi merupakan entitas dinamis yang memperoleh pemaknaan (interpretasi) berbeda-beda dari para filsuf dan ilmuwan politik

Dalam berbagai literatur ilmu politik konsep demokrasi dikaji dan dimaknai dengan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama kali muncul adalah pendekatan klasik-normatif yang lebih banyak membicarakan tentang ide-ide dan model-model demokrasi secara substantif. Pendekatan ini mengikuti garis pemikiran klasik – dari zaman Yunani kuno, abad pertengahan sampai pada pemikiran sosialisme Karl Marx – yang memaknai demokrasi sebagai sumber wewenang dan tujuan (kerangka preskripsi secara normatif untuk sistem politik). Pendekatan klasik normatif mendefinisikan demokrasi dengan term kehendak rakyat sebagai sumber atau alat untuk mencapai tujuan kebaikan bersama.⁴

Karena diilhami oleh banyak tradisi pemikiran, pendekatan klasik normatif memaknai dan mengukur

demokrasi secara maksimalis dengan memasukan unsur-unsur nonpolitik (sosial, ekonomi dan budaya). Kebebasan sebagai esensi dalam demokrasi tidak hanya diterjemahkan sebagai kebebasan politik (berbicara, memilih, berkumpul, berorganisasi) tetapi juga kebebasan sosial ekonomi, yakni bebas dari berkeadilan, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, keterbelakangan dan sebagainya. Para pemikir tradisional pencerahan seperti Rousseau dan Jhon Struat Mill hingga pemikiran radikal seperti Karl Marx sepakat bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan kendala bagi persamaan politik dan demokrasi. Dengan kata lain, suatu negara yang diwarnai dengan ketimpangan sosial ekonomi tidak bisa dikatakan demokratis meski kebebasannya terjamin.⁵

Disisi lain pendekatan klasik normatif sangat memperhatikan elemen konstitusi dan gagasan *rule of law* untuk mengatur prosedur kelembagaan, hak dan kewajiban rakyat (warga negara) serta untuk membatasi penggunaan kekuasaan sehingga mereka tetap berkuasa atas kehendak rakyat. Akan tetapi pendekatan klasik normatif mulai kehilangan pengaruh di hadapan ilmuwan politik ketika studi demokratisasi berkembang sejak akhir dekade 1970-an. Pendekatan ini hanya digunakan oleh para ilmuwan yang

⁴ Lihat Giovanni Sartori. 1987. *The Theory of Democracy Revisited*. (New York: Chatam House. Bandingkan dengan Carol Gould. 1988. *Rethinking Democracy*. Cambridge, New York: Cambridge University Press; Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*. New Heaven: Yale University Press.; dan Robert A. Dahl.. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press.

⁵ Georg Soronsen, 1993. *Democracy and Demo-cratization*. Boulder, Co: Westview press, hal 7-8

membicarakan ide-ide, wacana dan model-model demokrasi.

Studi demokrasi mutakhir yang menjamur dalam satu-dua dekade terakhir justru menerapkan pendekatan empirik-minimalis ketimbang normatif-maksimalis. Pendekatan empirik-minimalis yang menjadi basis untuk melihat peluang demokrasi pada pemilu 2009 penulis uraikan lebih mengacu pada konstruksi teorinya Robert A. Dahl. Dahl menawarkan sebuah konsep demokrasi minimalis yang disebut sebagai "poliarkhi"⁶. Di dalam poliarkhi ada sebuah derajat kontestasi publik yang tinggi (liberalisasi) maupun partisipasi (Inklusivitas). Untuk menjamin bekerja mekanisme poliarkhi, Dahl menyatakan bahwa rakyat harus diberi kesempatan untuk: (1) merumuskan pilihan (preferensi) atau kepentingannya sendiri; (2) memberitahukan preferensinya itu pada sesama warga negara dan pemerintah lewat tindakan individual maupun kolektif; (3) mengusahakan agar kepentingannya itu pertimbangannya secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak ada diskriminasi berdasarkan isu atau asalnya⁷. Tiga kesempatan itu dapat dicapai Dahl bila ditopang dengan delapan jaminan kelembagaan: (1) kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi

misalnya dalam partai politik; (2) kebebasan dalam menyampaikan pendapat; (3) hak memilih dalam pemilihan umum; (4) hak untuk menduduki jabatan publik; (5) hak para pemimpin untuk bersaing dan memperoleh dukungan dan suara rakyat; (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; (8) adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum, dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain⁸.

Sementara Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset menyederhanakan delapan kriteria Dahlian menjadi tiga kriteria untuk menandai sebuah sistem politik tersebut lebih demokratis, yaitu: (1) kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi untuk merebut jabatan yang mempunyai kekuasaan efektif pada jangka waktu teratur dan tidak menggunakan daya paksa; (2) partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan lewat pemilihan umum, yang diselenggarakan secara teratur dan adil sehingga tidak ada satupun kelompok sosial (warga negara biasa) tanpa kecuali; (3) tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan

⁶ Robert A. Dahl. 1971. *Op cit.* hal 2.

⁷ *Ibid.* hal 2

⁸ *Ibid.* hal 2-3

berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas, kompetisi dan partisipasi politik.⁹

Dengan melihat dua pendekatan yang berbeda di atas, penulis cenderung untuk memilih pendekatan empirik-minimalis ketimbang normatif-maksimalis. Tetapi penulis tidak akan membuang ide dan model demokrasi yang terangkum dalam pendekatan normatif. Bagi penulis ide dan model demokrasi sangat relevan dibicarakan sebagai kerangka preskripsi untuk menjelaskan peluang demokrasi pada pemilu 2009 di Yogyakarta. Namun pendekatan empirik-minimalis akan diberi bobot yang lebih besar dalam tulisan singkat ini, karena disamping ingin memetakan bagaimana bentuk perilaku memilih masyarakat terhadap partai politik pada pemilu 2009, penulis juga hendak mengkaji proses (empirik) peluang transisi menuju demokrasi pada pemilu 2009 di Yogyakarta

Jika ditempatkan pada perspektif komparatif, delapan kriteria Dahl, dan tiga kriteria Diamond dkk, akan penulis gunakan untuk memetakan derajat peluang demokrasi pada pemilu 2009 yang kemudian penulis bagi ke dalam beberapa

varian. Demokrasi di sini penulis tempatkan sebagai variabel kontinu bukan dikotomis dengan non-demokrasi yang dipilah menjadi tiga yakni demokrasi (penuh), semi demokrasi, dan nondemokrasi. Penulis membuat sebuah hipotesa awal: suatu sistem politik dikatakan demokrasi bila memenuhi tiga kriteria yang ditetapkan oleh Diamond dkk. Derajat di bawahnya adalah semidemokrasi atau disebut sebagai demokrasi yang terbatas (*restricted democracy*), yang ditandai oleh: (1) tingkatan substansial kompetisi dan kebebasan politik tetapi kekuasaan efektif para pemimpin yang terpilih sangat terbatas dan ada harapan dari preferensi publik; (2) kebebasan sipil dan politik sangat terbatas dimana orientasi dan kebebasan politik tidak bisa mengorganisir dan mengekspresikan kebebasan itu. Sementara derajat yang paling rendah adalah non-demokrasi yakni rezim yang tidak memberikan kesempatan berkompetisi dan berpartisipasi secara bebas.¹⁰ Sehingga nantinya bisa membingkai proses peluang demokrasi pada pemilu 2009 di Yogyakarta.

Perilaku Memilih (*Voting Behavior*)

Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilu.

⁹ Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1989. atau Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1990. *Op cit*, hal 6-7.

¹⁰ *Ibid*.hal 6

Menurut Jack Plano (1985)¹¹, perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka. Sementara itu, Huntington dan Nelson (1990)¹² menyebutkan perilaku memilih sebagai *electoral activity*, yakni termasuk pemberian suara (*votes*), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.

Selanjutnya perilaku memilih disini dikaitkan dengan proses pemungutan atau pemberian suara (*Voting*) dalam suatu pemilihan umum (pemilu). *Voting* merupakan kegiatan pengambilan keputusan dengan satu orang satu suara dalam pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan menurut Haryanto (1984), *Voting* adalah kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya.

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang

diberikan juga disebabkan karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud di sini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Dalam tulisan ini bentuk perilaku memilih masyarakat yang bisa di prediksi adalah berdasarkan survei terhadap pilihan partai politik peserta pemilu dari beberapa lembaga survei.

Menurut Josef Kristiadi (1991)¹³ penelitian mengenai perilaku memilih (*Voting Behavior*) dalam pemilu pada dasarnya mempergunakan beberapa pendekatan yang telah berkembang selama ini yakni :

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia (*Colombia's University Bureau of Applied Social Science*), sehingga lebih dikenal dengan kelompok Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai voting

¹¹ Jack Plano. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

¹²Huntington, Samuel P. dan Nelson W.Polsby. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹³J.Kristiadi. 1993. "Pemilu dan Perilaku Pemilih". *Disertasi*, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana, Univ Gadjah Mada, Jogjakarta.

pada tahun 1948 dan 1952. dimana dalam karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Gerald Pomper yang termasuk dalam mahzab ini merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi *voting behavior* ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial ekonomi pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Dengan kata lain, preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak¹⁴.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam pendekatan ini adalah agama, pendidikan, jenis kelamin, faktor geografis, budaya serta variabel sosial adalah variabel yang dominan dalam mempengaruhi seorang pemilih dalam menentukan pilihannya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa seorang pemilih cenderung untuk memilih partai yang memiliki agama yang

sama dengannya, kemudian juga dalam beberapa daerah memiliki rasa kedaerahan yang kuat untuk mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Seperti PDI P yang dominan di Provinsi Bali dan Sumatera Utara, atau loyalitas terhadap PKB di Jawa Timur, PPP di Kalimantan dan Loyalitas Sulawesi Selatan terhadap Partai Golkar.

2) Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survey Universitas Michigan (*University of Michigan's Survey Research Centre*), sehingga dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Hasil penelitian kelompok ini yang dikenal luas adalah *The Voter's Decide* (1954) dan *The American Voter* (1960).

Pendekatan ini muncul karena timbulnya ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis yang kurang dapat menjelaskan secara metodologis kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam suatu masyarakat, misalnya sulitnya menentukan kriteria pengelompokan masyarakat dan mengapa suatu kelompok mendukung atau memilih partai politik tertentu. Mazhab sosiologis hanya menjelaskan kecenderungan kelompok masyarakat mendukung partai tertentu. Selain itu, ada kecenderungan bahwa semakin lama dominasi kelas/kelompok masyarakat tertentu terhadap partai politik tertentu tidak lagi mutlak.

¹⁴Gerald Pomper. 1978. "*Voters Choice: Varieties of American Electoral Behavior*. New York: Dod, Mead Company. hal 195-208. dalam J.Kristiadi, *Pemilu dan Perilaku Pemilih*, Disertasi, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana, Univ Gadjah Mada, Jogjakarta.

Menurut mazhab ini terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pilihan seseorang yaitu keterikatan seseorang dalam partai politik, orientasi seseorang terhadap calon anggota parlemen, orientasi seseorang terhadap isu-isu politik. Misalnya, kalau seseorang mempunyai kecenderungan mengidentifikasikan diri dengan Partai Demokrat, dan kemudian terpicat isu-isu dan kandidat, maka dalam pemilu ia akan memilih Partai Demokrat. Inti mazhab ini adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang.¹⁵ Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih.

Proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun titik berat studi Kelompok Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik para calon, dan bukan latar belakang sosial atau budayanya. Melalui proses sosialisasi membantu perkembangan pendekatan psikologis

¹⁵ Mark N. Franklin "Voting Behavior" dalam Muhamad Asfar. *Pemilu dan perilaku memilih 1955-200*. Suarabaya: Pustaka Eureka, hal 141.

yang kuat antara seseorang dengan partai politik. Ikatan psikologis inilah nantinya akan dikenal sebagai proses dari sebuah identifikasi terhadap partai politik.

3) Pendekatan Rasional

Dalam memahami pendekatan rasional ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional bisa merupakan isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan.

Perilaku memilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau mendatangkan keraguan yang paling sedikit. Tetapi juga dalam hal memilih alternatif dengan resiko yang paling kecil. Dengan begitu asumsi pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan.¹⁶

III. PARTAI POLITIK: masih dalam bayang-bayang oligarki ?

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan

¹⁶Muhamad Asfar. *Pemilu dan perilaku memilih 1955-200*. Suarabaya: Pustaka Eureka, hal. 143.

demokrasi moderen. Demokrasi yang modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representative*) dimasa transisi ini, euforia politik mendorong terjadinya pragmatisme rekrutmen para pemimpin partai politik. Era reformasi adalah sebuah peluang untuk mengganti struktur massa menggangbang yang pernah didesain oleh Orba. Persoalannya adalah bagaimana membuat partai yang berakar pada masyarakat. Tetapi perluasan jaringan orgaisasi partai sejauh ini sebatas untuk mobilisasi dukungan massa dalam rangka untuk meraih kekuasaan, bukan dalam rangka untuk menerjemahkan fungsi-fungsi partai yang lebih komprehensif pada masyarakat.

Setiap partai politik pasti menjanjikan demokrasi. Tetapi sejauh mana janji-janji tersebut dapat diwujudkan? Apakah pejabat publik yang berasal dari partai kelak benar-benar menyuarakan kehendak mayoritas rakyat? Mengacu pada konstruksi teorinya Robert A. Dahl. Dahl menawarkan sebuah konsep demokrasi minimalis yang disebut sebagai "poliarkhi"¹⁷. Di dalam poliarkhi ada sebuah derajat kontestasi publik yang tinggi (liberalisasi) maupun partisipasi (Inklusivitas). Untuk menjamin bekerja mekanisme poliarkhi, Dahl menyatakan bahwa rakyat harus

diberi kesempatan untuk merumuskan pilihan (preferensi) atau kepentingannya sendiri serta memberitahukan preferensinya itu pada sesama warga negara dan pemerintah lewat tindakan individual maupun kolektif. Tiga kesempatan itu dapat dicapai kata Dahl bila ditopang dengan delapan jaminan kelembagaan: (1) kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi misalnya dalam partai politik; (2) kebebasan dalam menyampaikan pendapat; (3) hak memilih dalam pemilihan umum; (4) hak untuk menduduki jabatan publik; (5) hak para pemimpin untuk bersaing dan memperoleh dukungan dan suara rakyat; (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; (8) adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum, dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain¹⁸. Ketika penulis melihat prediksi hasil survei untuk kasus Yogyakarta dengan memakai analisa teorinya Dahl terlihat bahwa peran partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kalau dipersentasekan 37,6% dari total responden menyatakan cukup, dan hanya 8,5 % dari responden yang menyatakan partai politik yang ada telah memperjuangkan aspirasi masyarakat.

¹⁷ Robert A. Dahl. 1971. *Op cit*, hal2.

¹⁸ *Ibid*.hal 2-3

Ternyata ada sesuatu yang timpang antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh partai politik ketika teorisasinya Dahl dilaksanakan. Dimana letak ketimpangan ini? Partai politik adalah instrumen utama dari demokrasi, tetapi partai tidak bisa menghindar dari apa yang disebut oleh Robert Michels sebagai sebuah "hukum besi oligarki", yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) sekelompok kecil orang (minoritas) yang tidak mewakili kepentingan mayoritas rakyat¹⁹. Ada sebuah prediksi sementara penulis di sini pada pemilu 2009 nantinya, ketika melihat analisa untuk kasus Yogyakarta mengandung sebuah pernyataan sementara bahwa dalam hukum sosiologis yang paling fundamental dan sekaligus paradoksal adalah organisasi (baik partai maupun negara) dimana sebuah entitas yang melahirkan dominasi oleh minoritas terpilih atas pemilih. Setiap organisasi partai pasti akan menampilkan struktur oligarkis yang didasarkan pada basis demokratis. Dimana-mana dapat dijumpai massa pemilih, dan dapat dikatakan bahwa kekuasaan para pemimpin yang dipilih itu tidak terbatas. Struktur oligarkis telah membunuh prinsip dasar demokrasi dan penindasan tampaknya merupakan suatu keharusan.

¹⁹Robert Michels. 1984. *Partai Politik (Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi)*. Jakarta : CV. Rajawali

Menurut Sutoro Eko ada empat kecenderungan oligarki yang tampak dalam konteks hubungan antara pemerintah, partai politik, dan rakyat²⁰ dan itu masih membayangi pemilu 2009 nantinya, kecenderungan oligarki itu adalah:

Pertama, oligarki dari segi organisasi partai politik. Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk untuk mewadahi kepentingan dan mencapai tujuan bersama, tetapi para aktor yang membentuk dan yang menjadi anggota partai mau tidak mau harus merelakan hilangnya sebahagian kebebasan mereka demi kepentingan organisasi.

Kedua, oligarki dalam kepemimpinan partai. Partai-partai untuk menempatkan kadernya sebagai pemimpin nasional. Hasrat inilah yang disebut oleh Michels sebagai penyebab hukum besi oligarki. Bilamana muncul kepemimpinan yang kharimatis, hampir bisa dipastikan ia akan mengengam kekuasaan yang luar biasa didalam partai, bersamaan dengan itu akan muncul sebuah kultus individu.

Ketiga, oligarki dalam konteks hubungan partai dengan rakyat pendukung partai, dimana partai politik tidak pernah menempatkan warga negara sebagai entitas yang

²⁰Sutoro Eko. 2006. *Krisis Demokrasi Elektoral* dalam Demokrasi dan Potret Pemilu local 2004. Yogyakarta: Percik dan Pustaka Pelajar, hal 23.

beradab dan mempunyai hak-hak politik yang dijunjung tinggi. Para politisi partai selalu memanipulasi massa²¹ demi kepentingan mereka untuk meraih kekuasaan.

Keempat, oligarki dalam kekuasaan pemerintahan. Pemilihan umum adalah "pesta" yang untuk sementara melibatkan massa-rakyat. Setelah pesta bersama rakyat itu usai, para politisi yang telah meraih kekuasaan dan kekayaan secara oligarkis tidak lagi bersama rakyat. Pengalaman pasca pemilu 1999 membuktikan hal tersebut. Para petinggi yang berkuasa melupakan janji-janjinya yang telah mereka obral pada rakyat menjelang pemilihan umum

IV. PERGESERAN PERILAKU MEMILIH

Mengapa pemilih memilih partai A dan bukan partai B? Apakah pilihan seseorang pada suatu partai cenderung tetap ataukah bisa berubah dari satu waktu ke waktu lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah salah satu isu penting dari studi perilaku pemilih (*voter behavior*). Di sejumlah negara (terutama Amerika) kajian mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan

²¹Massa bukanlah fenomena yang temporer karena mereka- meski dapat diorganisir- tidak dibekali kemampuan untuk mengelola konflik . massa sendiri tidak terbentuk, dan karenanya mereka membutuhkan pembagian kerja, spesialisasi dan tuntutan meski massa rakyat tidak akan pernah memerintah kecuali secara teoritis yang sangat abstrak (*in abstracto*)

seseorang memilih suatu partai, sangat banyak. Penulis rasa kajian demikian ini kurang begitu berkembang di Indonesia. Tulisan dan penelitian mengenai partai politik selama ini lebih banyak diwarnai oleh studi kelembagaan (institusi) daripada perilaku pemilih.

Menjelang pemilu 2009, partai-partai politik mulai berbenah. Banyak usaha dilakukan untuk memperbaiki citra politik masing-masing. Ada partai politik yang mengintensifkan kegiatan harian. Ada yang memasang spanduk dan atribut di penjuru Kota. Ada yang menampilkan foto sang ketua umum di berbagai media elektronik dan cetak. Ada pula yang menyelenggarakan acara-acara *fun* seperti senam bersama. Semua dilaksanakan agar citra di mata masyarakat meningkat. Harapannya, membaiknya citra di mata masyarakat akan berujung pada kenaikan perolehan suara di pemilu 2009 kelak.

Jika kita mengkaji pemilu 1999, 2004, kita akan menemukan fenomena *swing voters*²² yang relatif tinggi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei seperti LSI , LP3ES, IRI dst terhadap pemilu 1999 dan 2004, ternyata ditemukan tingginya *swing voters* yang mengakibatkan perubahan perolehan suara dan peringkat partai politik²³.

²²segmen pemilih yng suaranya mudah berubah

²³I Ketut Putra Erawan dkk. 2006. Draf modul manajemen pemilu dan perilaku memilih

Dinamika suara partai dalam satu tahun terakhir ini cenderung bergeser. Suara untuk partai-partai kategori “menengah“ (PKB, PPP, PAN, dan PKS) tampak stabil. Sementara suara untuk partai-partai “atas” (PDIP, Golkar dan Demokrat) berfluktuasi dari satu waktu ke waktu lain. Di tahun 2006, posisi Partai Demokrat sempat naik tetapi turun di tahun 2007. Posisi satu dan dua dari satu waktu ke waktu lain tampak diperebutkan oleh PDIP dan Golkar.

Bagaimana dengan pergeseran perilaku memilih di DIY? Apakah konstituen masih tetap konsisten dengan partai pilihannya pada pemilu 2004 yang lalu? Berdasarkan hasil survey terlihat ternyata fenomena *swing voter* masih tetap muncul walaupun persentasenya masih relatif kecil, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Parpol pilihan pada Pemilu 2004

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Partai Golkar	19	13.5	13.5	13.5
	PDI-P	18	12.8	12.8	26.2
	PPP	15	10.6	10.6	36.9
	PKB	20	14.2	14.2	51.1
	Partai Demokrat	16	11.3	11.3	62.4
	Partai Keadilan Sejahtera	18	12.8	12.8	75.2
	Partai Amanat Nasional	16	11.3	11.3	86.5
	Rahasia	12	8.5	8.5	95.0
	Belum punya hak pilih	2	1.4	1.4	96.5
	Tidak ikut memilih	2	1.4	1.4	97.9
	Tidak tahu/jawab	3	2.1	2.1	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Sumber: laporan survei Potret Tata Kelola Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia tahun 2007

Parpol, parlemen dan pemilu. PLOD dan JIP Fisipol UGM. Hal 11.

Table 2. Apakah dukungan thd partai sebelum, pada saat atau sesudah Pemilu Legislatif 2004

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sebelum pemilu legislatif 2004	92	65.2	65.2	65.2
	Pada saat pemilu legislatif 2004	29	20.6	20.6	85.8
	Sesudah pemilu legislatif 2004	9	6.4	6.4	92.2
	Tidak tahu/jawab	11	7.8	7.8	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Sumber: laporan survei Potret Tata Kelola Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia tahun 2007

Tabel 3. Apakah dlm Pemilu 2009, mengalihkan dukungan atau tidak?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tetap memilih partai yang didukung saat ini	94	66.7	66.7	66.7
	Ada kemungkinan mengalihkan dukungan kpd partai lain	21	14.9	14.9	81.6
	Tidak akan mendukung partai manapun	4	2.8	2.8	84.4
	Tidak tahu/jawab	22	15.6	15.6	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Sumber: laporan survei Potret Tata Kelola Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia tahun 2007

Tabel 4. . Partai yang didukung saat ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Partai Golkar	17	12.1	12.1	12.1
	PDI-P	13	9.2	9.2	21.3
	PPP	19	13.5	13.5	34.8
	PKB	14	9.9	9.9	44.7
	Partai Demokrat	20	14.2	14.2	58.9
	Partai Keadilan Sejahtera	19	13.5	13.5	72.3
	Partai Amanat Nasional	13	9.2	9.2	81.6
	Rahasia	13	9.2	9.2	90.8
	Belum punya hak pilih	1	.7	.7	91.5
	Tidak ikut memilih	2	1.4	1.4	92.9
	Tidak tahu/jawab	10	7.1	7.1	100.0
	Total	141	100.0	100.0	

Sumber: laporan survei Potret Tata Kelola Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia tahun 2007

Pada tabel 1 terlihat pemilu legislatif tahun 2004 di DIY partai Golkar masih menempati posisi teratas pilihan masyarakat yang kemudian diikuti dengan PDI-P dan PKS, tetapi dari temuan data pada tabel 2 dan 3 dan 4 terlihat muncul fenomena *swing voters* dimana untuk pemilu 2009 di DIY prediksi dari hasil survey pilihan masyarakat akan beralih ke partai demokrat, PKS dan PPP.

Munculnya fenomena *swing voters* tidak terlepas dari adanya perubahan perilaku dan sikap politik terhadap partai politik, perubahan orientasi (tipe dan ideologi) yang menyebabkan konstituen terlepas dan atau mengikat pemilih baru.

Ada sejumlah alasan yang penulis lihat dari pemilih ketika memilih suatu partai dan penulis jadikan sebagai acuan untuk memprediksikan perilaku memilih pada masyarakat DIY pada pemilu 2009, alasan yang dipakai untuk memilih partai tersebut penulis bagi ke dalam tiga kategori. *Pertama*, alasan kemampuan partai dalam memecahkan masalah (misalnya kemampuan partai dalam mengatasi masalah ekonomi, memberantas korupsi dan sebagainya). *Kedua*, alasan yang sifatnya sosiologis (misalnya kesamaan daerah, suku bangsa, kesamaan agama dan ideologi dan sebagainya). *Ketiga*, alasan psikologis (suka dengan pemim-

pinnya, terbiasa memilih partai tersebut dan sebagainya).

V. PENUTUP

Studi mengenai perilaku pemilih di Indonesia masih relatif baru. Karena itu, teori yang dipakai, konsep pengukuran belum kokoh seperti halnya di Amerika. Satu penelitian kerap menggunakan konsep dan pengukuran yang berbeda. Bahkan beberapa studi kerap kali bertentangan hasil dan kesimpulannya satu sama lain. Perbedaan tantangan studi perilaku pemilih di Indonesia adalah pada ketersediaan data. Idealnya, studi perilaku pemilih menggunakan data hasil survei. Sayangnya, melakukan survei di Indonesia sangat mahal akibat luasnya wilayah Indonesia. Ini menyebabkan studi perilaku pemilih kurang menarik minat peneliti. Peneliti perlu punya sumber dana yang cukup besar untuk menjalankan studi perilaku pemilih. Peneliti yang terbatas dana penelitian, umumnya mengambil jalan “pintas” dengan melakukan penelitian perilaku pemilih di wilayah-wilayah kasus tertentu sehingga hasilnya tidak bisa pola perilaku pemilih di Indonesia.

Masalah ini sebenarnya bisa diatasi jika ada data hasil survei periodik yang dibuat oleh lembaga atau konsorsium yang hasilnya bisa diakses oleh masyarakat luas. Data ini dikumpulkan dalam skala nasional dan dilakukan secara periodik. Misalnya

dalam bidang ekonomi. Riset dan kajian ekonomi sangat terbantu dengan data-data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indikator-indikator ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan data lain. Data-data ini sangat berguna misalnya melihat berbagai variabel yang mempengaruhi inflasi, variabel yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebagainya. Riset bidang sosial juga sangat terbantu dengan adanya data - data agregat mengenai sosial yang dibuat oleh BPS-misalnya lewat survei ketenagakerjaan, indikator sosial dan sebagainya.

Di ranah teoritik perilaku memilih di Indonesia sangat dipengaruhi dengan logika representasi pendukung dan logika kompetisi. Sehingga kita akhirnya mengenal pemilahan sosial yang ada dalam bentuk partai-partai dengan ideologi dan aliran yang berbeda. Dari dua logika diatas logika representasi pendukung secara langsung bisa menjelaskan kepada kita bagaimana tingkah laku dari partai politik ketika ingin memenangkan suara dalam pemilu. Proses pemilahan partai politik di Indonesia (partai massa dan partai kader) memiliki logika representasi pendukung yang paling utama, karena secara teoritik dua pemilahan partai tersebut digerakan oleh keinginan dan dinamika elite/kader pendukungnya. Di sinilah letak pemetaan dari perilaku memilih

dan fenomena *swing voter* yang terjadi pada masyarakat.

Hingga saat ini peta dukungan partai politik khususnya di DIY masih diwarnai oleh partai-partai lama, yang berkiprah pada Pemilu Legislatif 2004. Tetapi, masih ada waktu kurang lebih 9 bulan dari sekarang, sebelum Pemilu 2009. Masing-masing partai mempunyai kesempatan untuk mendapat dukungan pemilih. Walaupun *swing voters* masih tetap membayangi pemilu di DIY pada tahun 2009 dan partai politik yang ada harus jeli memanfaatkan berbagai kesempatan yang muncul, misalnya: kedekatan dan identifikasi pemilih pada partai (Party ID) di Indonesia relatif kecil—jika dibandingkan dengan pemilih di Amerika dan Eropa. Ini artinya, hanya sedikit pemilih yang punya kedekatan emosional sangat/cukup dekat dengan partai. Pemilih bisa berpindah atau berubah pilihan. Survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga juga menunjukkan loyalitas pemilih yang tidak tinggi. Hanya sekitar separoh pemilih yang mengatakan akan memilih kembali partai yang sudah dipilih pada Pemilu 2004, karena berbagai alasan misalnya sudah terbiasa memilih partai tersebut, puas dengan kerja partai dan sebagainya. Ini artinya masih cukup banyak pemilih yang bisa dipengaruhi untuk berubah. Masing-masing partai mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing memperebutkan pemilih. Pemilu tahun 2009 nanti,

kemungkinan akan diikuti oleh partai-partai baru. Tantangan terbesar dari partai baru adalah pengenalan pemilih. Di tengah banyaknya partai, pemilih harus disadarkan adanya keberadaan partai baru. Butuh kerja keras dan sosialisasi besar-besaran agar nama partai dikenal oleh pemilih.

Percaturan politik, termasuk hitung-hitungan hasil Pemilu 2004 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hampir pasti harus menyinggung posisi Keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa. resonansi Kekuasaan Keraton Yogyakarta dalam Masyarakat pada Era

Demokrasi masih terlihat jelas dari penerimaan masyarakat Yogyakarta terhadap peran Keraton dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan masih tinggi. Kecenderungan pemilih di DIY yang bersikap pragmatis merupakan catatan tersendiri bagi parpol peserta Pemilu 2009. Keyakinan sebagian elite parpol bahwa massa mereka ideologis bisa jadi salah. Dengan kecenderungan seperti ini, pergeseran suara memang bisa berubah. Publik mungkin tidak terlalu hirau dengan Keraton jika lembaga yang menjadi patron itu tidak menjalankan fungsi yang konkret.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Carol Gould. 1988. *Rethinking Democracy*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Georg Soronsen. 1993. *Democracy and Democratization*. Boulder, Co: Westview Press.
- Gerald Pomper. 1978. "Voters Choice: Variaties of American Electoral Behavior. New York: Dod, Mead Company. hal 195-208. dalam J.Kristiadi, *Pemilu dan Perilaku Pemilih*, Disertasi, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana, Univ Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Giovanni Sartori. 1987. *The Theory of Democracy Revisited*. (New York: Chatam House.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson W.Polsby. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Ketut Putra Erawan dkk. 2006. *Draf modul Manajemen Pemilu Dan Perilaku Memilih Parpol, parlemen dan pemilu*. PLOD dan JIP Fisipol UGM.
- J.Kristiadi. 1993. "Pemilu dan Perilaku Pemilih". *Disertasi*, Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana, Univ Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Jack Plano. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

- Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1989. *Democracy in Asia*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
- Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1990. *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
- Lingkaran Survai Indonesia:Kajian Bulanan edisi Edisi 06 - Oktober 2007.
- Muhamad Asfar. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-200* . Suarabaya: Pustaka Eureka
- Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*. New Heaven: Yale University Press.
- _____. 1971. *Polyarchy: participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press.
- Robert Michels. 1984. *Partai Politik (Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi)*. Jakarta : CV. Rajawali
- Sutoro Eko . 2006. *Krisis Demokrasi Elektoral dalam Demokrasi dan Potret Pemilu local 2004*. Yogyakarta: Percik dan Pustaka Pelajar.